



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani - Palima Serang, Telp. (0254) 267099

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN**

NOMOR: 048/KEP.31-SATPOL.PP/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK, DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN, BIAYA LAYANAN INFORMASI, DAN MAKLUMAT PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi, transparansi keuangan serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, serta mendukung *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tentang Penetapan Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi Yang Dikecualikan, Biaya Layanan Informasi, Dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan

Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 38);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 63)
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 16);
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 59);
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan Pengawas Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan Pengawas Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 60);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi Banten Tahun 2018-2022 (Berita Daerah
Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 14).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK, DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN, BIAYA LAYANAN INFORMASI, DAN
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN
2021
- KESATU : Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Layanan Informasi diberikan secara gratis (tidak
dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau
perekaman, pemohon dapat melakukan penggandaan/
fotocopy dengan biaya sendiri atau menyediakan
CD/DVD kosong untuk perekaman data.
- KEEMPAT : Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 30 April 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN**



AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19710805 199101 1 001

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Banten.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI BANTEN
 NOMOR: 048/KEP.31-SATPOL.PP/2021 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK, DAFTAR
 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN, BIAYA LAYANAN
 INFORMASI, DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI
 PUBLIK TAHUN 2021

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
 TAHUN 2021

No.	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Keputusan	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA								
1.	Informasi tentang Profil Badan Publik							
1.1	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN Alamat: Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kec.Curug, Kota Serang Telepon: (0254) 267099 Email: satpolpp_banten@yahoo.com datindata@gmail.com Website: https://satpolpp.bantenprov.go.id/ Instagram: https://www.instagram.com/satpol_pp_provinsi_banten	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	

No.	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Keputusan	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Tugas & Fungsi	Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
1.3	Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang & Fungsi	Tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
1.4	Profil Singkat Pejabat Struktural	Komposisi Pegawai pada Satpol PP Provinsi Banten	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
1.5	LHKPN	LHKPN Kepala Dinas serta Pejabat lainnya yang telah di verifikasi/diperiksa KPK.	Kasubag Umpeg	Sekretaris	2020	softcopy	Selama berlaku	
2.	Ringkasan Informasi tentang Program & Kegiatan	Ringkasan Informasi tentang Program/Kegiatan yang sedang dilaksanakan						
2.1	Nama Program & Kegiatan	Daftar nama program & kegiatan tertuang dalam DPA	Kasubag PEP	Sekretaris	2021	softcopy	1 (satu) tahun	
2.2	Penanggung jawab & Pelaksana Program	Penanggung jawab & pelaksana program & kegiatan tertuang dalam DPA	Kasubag PEP	Sekretaris	2021	softcopy	1 (satu) tahun	
2.3	Target & Capaian Program/Kegiatan	Target & capaian program & kegiatan tertuang dalam DPA	Kasubag PEP	Sekretaris	2021	softcopy	1 (satu) tahun	
2.4	Jadwal Pelaksanaan Program/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan program & kegiatan tertuang dalam DPA	Kasubag PEP	Sekretaris	2021	softcopy	1 (satu) tahun	
2.5	Nilai Anggaran Kegiatan per Program	Nilai anggaran program & kegiatan tertuang dalam DPA	Kasubag PEP	Sekretaris	2021	softcopy	1 (satu) tahun	
2.6	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU) pelaksanaan kegiatan	Kasubag PEP	Sekretaris	2021	softcopy	1 (satu) tahun	
2.7	Perjanjian Kinerja (Perkin)	Perjanjian Kinerja (Perkin) oleh Penanggung jawab & Pelaksana Program/Kegiatan	Kasubag PEP	Sekretaris	2021	softcopy	1 (satu) tahun	

No.	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Keputusan	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Ringkasan Kinerja yang telah maupun sedang dilaksanakan							
3.1	Penilaian Kinerja	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi kinerja, akuntabilitas, efisiensi, kegiatan yang telah dilaksanakan dan penggunaan anggaran.	Kasubag PEP	Sekretaris	2020	softcopy	1 (satu) tahun	
3.2	Efisiensi yang dicapai	Efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam LAKIP.	Kasubag PEP	Sekretaris	2020	softcopy	1 (satu) tahun	
3.3	Laporan seluruh Program & Kegiatan yang telah dijalankan	Tercantum dalam LAKIP, LPPD, dan LKPJ.	Kasubag PEP	Sekretaris	2020	softcopy	1 (satu) tahun	
3.4	Laporan Umum & Keuangan	Tercantum dalam LAKIP, LPPD, dan LKPJ.	Kasubag PEP	Sekretaris	2020	softcopy	1 (satu) tahun	
3.5	Realisasi Penyerapan Program dan Kegiatan	Tercantum dalam LAKIP, LPPD, dan LKPJ.	Kasubag PEP	Sekretaris	2020	softcopy	1 (satu) tahun	
3.6	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan <i>progress report</i> atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah.	Kasubag PEP	Sekretaris	2020	softcopy	1 (satu) tahun	
4.	Ringkasan Laporan Keuangan							
4.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Kasubag Keuangan	Sekretaris	2020	softcopy	1 (satu) tahun	
4.2	Neraca	Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional organisasi, dan modal pada waktu tertentu.	Kasubag Keuangan	Sekretaris	2020	softcopy	1 (satu) tahun	

No.	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Keputusan	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka pengungkapan yang memadai. Ringkasan aset yang dimiliki.	Kasubag Keuangan	Sekretaris	2020	softcopy	1 (satu) tahun	
4.4	Daftar Aset	Ringkasan aset yang dimiliki.	Kasubag Umpeg	Sekretaris	2020	softcopy	1 (satu) tahun	
5.	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan							
5.1	Daftar rancangan peraturan/keputusan	Daftar Rancangan Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan yang akan ditetapkan atau dalam pembahasan	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
5.2	Daftar Peraturan/Keputusan yang telah ditetapkan	Daftar Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan yang telah ditetapkan	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
6.	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik							
6.1	Permohonan informasi publik	Bagan alur, syarat dan waktu permohonan informasi/pengajuan keberatan dan pihak-pihak bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Kasi Datin	PPID Pembantu	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
6.2	Pengajuan keberatan	Bagan alur, syarat dan waktu permohonan informasi/pengajuan keberatan dan pihak-pihak bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Kasi Datin	PPID Pembantu	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
6.3	Permohonan penyelesaian sengketa informasi	Bagan alur, syarat dan waktu permohonan informasi/pengajuan keberatan dan pihak-pihak bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Kasi Datin	PPID Pembantu	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
6.4	Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik	Bagan alur, syarat dan waktu permohonan informasi/pengajuan keberatan dan pihak-pihak bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Kasi Datin	PPID Pembantu	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
6.5	Pengaduan	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang melalui Lapor.go.id	Kasi Datin	PPID Pembantu	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	

No.	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Keputusan	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa							
7.1	Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa	Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa diakses melalui Sirup LKPP: https://sirup.lkpp.go.id	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
7.2	Pengumuman Proses Pengadaan	Pengumuman Proses Pengadaan diakses melalui LPSE Banten: https://lpse.bantenprov.go.id	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
8.	Informasi Lainnya							
8.1	Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Daftar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Pemerintah Provinsi Banten	Kasi PPNS	Kabid PPUD	2021	softcopy	Selama berlaku	
8.2	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Banten	Kasubag PEP	Sekretaris	2021	softcopy	Selama berlaku	
8.3	Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan dan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kasubag Umpeg	Sekretaris	2021	softcopy	Selama berlaku	
B.	INFORMASI YANG SERTA MERTA							
1.	Informasi Penting							
1.1	Nomor telepon penting	Daftar informasi telepon penting di Provinsi Banten	Kasi Datin	PPID Pembantu	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
1.2	Prakiraan Cuaca	Prakiraan cuaca dari BMKG: https://www.bmkg.go.id/	Kasi Datin	PPID Pembantu	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
1.3	Pemerintah Provinsi Banten	Informasi seputar Pemerintah Provinsi Banten: https://bantenprov.go.id/	Kasi Datin	PPID Pembantu	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
1.4	Statistik Daerah	Informasi statistik daerah Banten: https://www.bps.go.id/	Kasi Datin	PPID Pembantu	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
1.5	Badan POM	Informasi dari BPOM: https://www.pom.go.id/new/	Kasi Datin	PPID Pembantu	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
2.	Informasi Bencana Daerah							
2.1	Bencana Daerah	Data bencana yang terjadi di Provinsi Banten	Kasi Datin	PPID Pembantu	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
2.2	BPBD Provinsi Banten	Informasi dari BPBD Provinsi Banten: https://bcbd.bantenprov.go.id/	Kasi Datin	PPID Pembantu	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
2.3	Penanggulangan COVID-19	Informasi penanggulangan COVID-19: https://infocorona.bantenprov.go.id/	Kasi Datin	PPID Pembantu	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	

No.	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Keputusan	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT								
1. Daftar Informasi Publik								
1.1	Informasi yang diumumkan secara berkala	Berisi tentang informasi publik yang tersedia secara berkala	Kasi Datin	PPID Pembantu	2021	softcopy	1 tahun	
1.2	Informasi yang serta merta	Berisi tentang informasi publik yang tersedia secara serta merta	Kasi Datin	PPID Pembantu	2021	softcopy	1 tahun	
1.3	Informasi yang tersedia setiap saat	Berisi tentang informasi publik yang tersedia secara setiap saat	Kasi Datin	PPID Pembantu	2021	softcopy	1 tahun	
1.4	Daftar informasi Yang dicekualikan	Berisi tentang informasi publik yang dicekualikan	Kasi Datin	PPID Pembantu	2021	softcopy	1 tahun	
1.5	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Berisi Laporan Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Satpol PP Provinsi Banten	Kasi Datin	PPID Pembantu	2020	softcopy	1 tahun	
2. Informasi tentang Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan								
2.1	Daftar rancangan peraturan/keputusan	Daftar Rancangan Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan yang akan ditetapkan atau dalam pembahasan	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
2.2	Daftar Peraturan/Keputusan yang telah ditetapkan	Daftar Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan yang telah ditetapkan	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
3. Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan								
3.1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil & keuangan	Daftar peraturan sebagai pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil & keuangan	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
3.2	Profil lengkap pimpinan & pegawai.	Komposisi Pegawai pada Satpol PP Provinsi Banten	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	
3.3	Anggaran secara umum/khusus serta laporan keuangannya	Tertuang dalam Renja, DPA, LKPJ, LAKIP, dan Laporan Realisasi Keuangan.	Kasubag PEP dan Kasubag Keuangan	Sekretaris	2020 dan 2021	softcopy	1 tahun	
3.4	Informasi Kegiatan	Informasi tentang nama Program/Kegiatan	Kasubag PEP	Sekretaris	2021	softcopy	1 tahun	
4. Daftar Perjanjian/Kerja sama								
4.1	Perjanjian/Kerja sama	Daftar perjanjian kerja sama	Kasi Kerja sama	Kabid Tibum	Perbaharui 2021	softcopy	Selama berlaku	

No.	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Keputusan	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Rencana Strategis							
5.1	RPJMD	RPJMD Provinsi Banten	Kasubag PEP	Sekretaris	Perbaharui 2021	<i>softcopy</i>	Selama berlaku	
5.2	RKPD	RKPD Provinsi Banten	Kasubag PEP	Sekretaris	2021	<i>softcopy</i>	1 tahun	
5.3	Rencana Strategis (Renstra)	Renstra Satpol PP Provinsi Banten	Kasubag PEP	Sekretaris	2021	<i>softcopy</i>	Selama berlaku	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN**



AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19710805 199101 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI BANTEN
 NOMOR: 048/KEP.31-SATPOL.PP/2021 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK, DAFTAR
 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN, BIAYA LAYANAN
 INFORMASI, DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI
 PUBLIK TAHUN 2021

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
 TAHUN 2021**

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1.	Informasi yang mengungkapkan Informasi Pribadi a. Data Kepegawaian b. Data Pribadi Pelaku Usaha	3 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i, huruf j.	4 1. Mengungkap data pribadi; 2. Melanggar HAM.	5 Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	6 Tidak terbatas.
2.	Informasi yang mengungkap proses pemeriksaan internal: • Data-data terkait proses pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Sampai menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan.

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1	2	3	4	5	6
3	<p>Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum:</p> <p>a. Jadwal dan rencana kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi;</p> <p>b. Informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum;</p> <p>c. Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/Perkada dan Operasi Non Yustisi</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p>	<p>Menghambat proses penegakan hukum, seperti penghilangan barang bukti.</p>	<p>Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum.</p>	<p>Sampai dengan proses penegakan hukum selesai.</p>

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN**



AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19710805 199101 1 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
NOMOR: 048/KEP.31-SATPOL.PP/2021
TENTANG PENETAPAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK, DAFTAR
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN,
BIAYA LAYANAN INFORMASI, DAN
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2021

**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

Informasi Publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku PPID Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, kami berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan Informasi Publik.

Kami sanggup menyelenggarakan Informasi Publik sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN**



AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19710805 199101 1 001